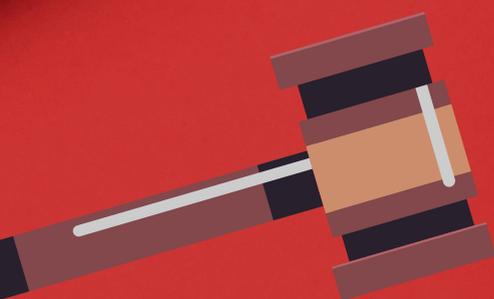




LAPORAN AKHIR HUKUM DAN HUMAS

BAWASLU KABUPATEN CILACAP



2021

**LAPORAN DIVISI HUKUM HUMAS DAN DATA INFORMASI
BAWASLU KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, atas rahmat, barokah, dan ridho-Nya Sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akhir Divisi Hukum Humas dan data Informasi Bawaslu Kabupaten Cilacap Tahun 2021. Laporan Akhir Divisi ini sebagai bagian dari publikasi kegiatan dan program kerja yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap.

Padat Tahun 2021 Bawaslu Cilacap dan juga 35 Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah tidak melaksanakan Pilkada, namun upaya tegaknya keadilan Pemilu tetap terus dilaksanakan. Dengan cara memberikan informasi, pembinaan dan mengedukasi masyarakat berbagai kalangan, baik generasi milenial maupun masyarakat pedesaan, dengan berbagai metode dan juga strategi dalam rangka mengupayakan kesadaran berpolitik yang cerdas. Berbagai upaya diantaranya dengan menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai Perguruan Tinggi sebagai komunitas intelektual dan organisasi masyarakat serta *stakeholders*.

Laporan Akhir Divisi Hukum, Humas dan data informasi Tahun 2021 ini menyajikan hasil kinerja Divisi Hukum, Humas, dan Data informasi yang peran dan kiprahnya memiliki peranan penting dalam menerjemahkan antara regulasi dengan permasalahan yang ditangani oleh lembaga, juga menjadi mediator lembaga untuk menjembatani komunikasi dengan masyarakat, baik dengan komunikasi verbal maupun nonverbal, apalagi di masa pandemik covid 19 yang belum juga berakhir, peran kehumasan sangat strategis dalam menjembatani komunikasi lembaga dengan Masyarakat lewat literasi digital.

Laporan ini juga dimaksudkan untuk menjadi bahan evaluasi kinerja divisi Hukum Humas dan data informasi dimasa yang akan datang agar senantiasa terus bekerja memperbaiki kinerja lembaga kearah yang lebih baik. Dalam penyusunan laporan ini tentunya masih banyak terdapat kekurangan, kesalahan dan kekhilafan karena keterbatasan yang kami punya. Bawaslu Kabupaten Cilacap berharap pembaca bersedia memberikan kritik dan saran yang membangun atas laporan ini.

 KETUA

BACHTIAR HASTIARTO, S.H., M.H.
KETUA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TUGAS DIVISI HUKUM HUMAS DAN DATA INFORMASI	4
BAB III SDM , SARANA DAN PRASARANA HUMAS	
A. SUMBER DAYA MANUSIA HUMAS.....	6
B. SARANA DAN PRASARANA HUMAS.....	8
BAB IV PUBLIKASI PEMBERITAAN DAN MEDIA SOSIAL	
A. PLATFORM MEDIA BAWASLU CILACAP DAN PERKEMBANGANYA.....	10
B. KEGIATAN LAIN TERKAIT KEHUMASAN	19
BAB V CAPAIAN DIVISI HUKUM	
A. ADVOKASI BANTUAN HUKUM DAN DOKUMENTASI HUKUM	21
B. ANALISIS (KAJIAN HUKUM)	22
C. SOSIALISASI PRODUK HUKUM	23
BAB VI RENCANA KERJA DIVISI HUKUM, HUMAS, DATA DAN INFORMASI	
BAWASLU KABUPATEN CILACAP.....	30
BAB VII PENUTUP	
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

Daftar Gambar

	Halaman
Gambar 3.1 Sarana Prasarana.....	8
Gambar 4.1 Tampilan Website Utama.....	12
Gambar 4.2 Statistik Pengunjung Website Utama.....	13
Gambar 4.3 Statistik Pengunjung Website Utama.....	14
Gambar 4.4 Statistik Website PPID.....	14
Gambar 4.5 Website e-wadul.....	15

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 3.1 Statistic Pengunjung Website cilacap.bawaslu.go.id.....	7
Tabel 3.2 Sarana yang sudah ada dan Kondisi.....	9
Tabel 3.3 Sarana yang Belum Ada.....	9
Tabel 4.1 Buletin Bawaslu Cilacap.....	12
Tabel 4.2 Rincian Jumlah Pemberitaan.....	13
Tabel 4.3 Rincian Publikasi Youtube.....	15
Tabel 4.4 Rincian Publikasi Instagram.....	16
Tabel 4.5 Rincian Publikasi Fanspage Facebook.....	17
Tabel 4.6 Rincian Publikasi Twitter.....	18
Tabel 4.7 Rincian Konten.....	18
Tabel 5.1 Sosialisasi Produk Hukum.....	23
Tabel 5.2 Sosialisasi Produk Hukum Daring.....	28
Tabel 5.2 Sosialisasi Produk Hukum Daring.....	30

BAB 1

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024 mulai terdengar riuh mengumandang, persiapan yang sangat terlihat dan begitu terasa oleh lembaga yang terkait dengan proses penyelenggaraan Pemilu. Karena Pemilu merupakan mekanisme penting dalam memfasilitasi kompetisi politik, mekanisme tersebut melibatkan partai politik sebagai peserta / kandidat, yang nantinya akan menduduki posisi strategis dalam pemerintahan dan melibatkan masyarakat sebagai pemegang keputusan dalam menentukan arah kepemimpinan suatu bangsa. sehingga penyelenggara pemilu mempunyai tanggung jawab besar untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berlangsung secara damai dan tertib. Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis dengan melibatkan serangkaian prosedur, termasuk Desain Kelembagaan yang terlibat didalamnya menjadi instrumen dasar yang diharapkan dapat membangun konsensus dan budaya politik bagi warga negara.

Bawaslu Cilacap sebagai penyelenggara pemilu punya kewenangan dalam mempersiapkan tahapan Pemilu serentak tahun 2024, dengan mempersiapkan diri dengan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan secara maksimal, baik kapasitas SDM maupun dalam bentuk sosialisasi produk hukum yang terkait dengan persiapan pelaksanaan pemilu serentak kepada masyarakat, melalui tatap muka maupun melakukan literasi media.

Hukum, Humas dan Data Informasi dapat kita klasifikasikan lebih spesifik sesuai bagian tanggung jawabnya. Hukum merupakan jantung dari lembaga Bawaslu yang berperan dalam menerjemahkan suatu permasalahan agar dapat mewujudkan tegaknya keadilan Pemilihan Umum. Humas merupakan garda terdepan dalam mempublikasikan kinerja lembaga, tanpa adanya publikasi oleh humas, publik akan merasa bingung dalam memahami tugas dan wewenang dari lembaga tersebut, dan lembaga akan menjadi lebih sulit dalam mendapatkan *trust* atau kepercayaan dari publik. Data Informasi merupakan sekumpulan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan disajikan secara komunikatif dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.

Bawaslu Kabupaten Cilacap adalah badan publik yang mempunyai fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, dan secara spesifik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Program dan kegiatan yang terlaksana pada tahun 2021 yaitu ada sejumlah 45 dengan rincian 10 program dan kegiatan dengan sumber APBN dan 35 program dan kegiatan yang bersumber dari non APBN atau non budgeter. Capaian yang cukup besar yaitu senilai 86,54% dari rencana kerja yang telah disusun pada awal tahun 2021. Program yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap dengan sumber anggaran dari APBN merupakan program nasional yang direncanakan oleh Bawaslu dan 35 program dan kegiatan merupakan program dan kegiatan yang dikembangkan oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap.

Peran serta divisi Hukum, Humas dan Data Informasi pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 dapat dilihat melalui publikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap, seperti pembentukan Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang, Bawaslu *goes to school*, *Live Streaming* youtube Obrolan Bawaslu Seputar Demokrasi dan Nota Kesepahaman atau MoU yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Cilacap dengan Stakeholder terkait.

Koordinator Divisi yang membidangi Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi pada tahun 2021 dijabat oleh Umi Fadilah, S.Ag.,M.Si. Pada tahun 2021 merupakan fase lanjutan dari adanya pandemik Covid-19, dimana sosialisasi boleh untuk dilakukan secara tatap muka dengan batasan-batasan yang harus dipatuhi. Bawaslu Kabupaten Cilacap berupaya untuk mengoptimalkan sosialisasi melalui layanan daring. Peran kehumasan sangat strategis menempati posisi dominan sebagai divisi yang mengambil bagian penting dalam rangka menopang eksistensi lembaga dengan memaksimalkan media internet sebagai alih fungsi media luring, untuk mensukseskan kinerja lembaga Bawaslu serta menciptakan citra yang positif terhadap kinerja lembaga.

Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi dapat berkolaborasi untuk menjadi representasi lembaga yang mempunyai kapasitas dalam menegakkan keadilan pemilu. Pada bagian Hukum memberikan Analisa dan Kajian terhadap Produk Hukum, ketika lembaga menangani sebuah permasalahan hukum terkait Pemilihan Umum atau Pemilihan. Hasil dari Analisa dan Kajian Produk Hukum menjadi tanggung jawab bagian Humas dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Dalam melakukan sosialisasi bagian Humas mendapatkan dukungan dari bagian Data dan Informasi terkait penyediaan dan pemanfaatan teknologi informasi guna mendokumentasikan setiap basis data yang dikelola oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap.

Kolaborasi yang dilakukan oleh Hukum, Humas dan Data Informasi dapat menghasilkan sebuah layanan informasi. layanan tersebut diberikan kepada publik dalam rangka menyediakan fasilitas literasi media di tengah banjirnya hoax, provokasi, dan adu domba. Informasi yang disampaikan berupa narasi kearifan, optimisme, dan membangun kesadaran masyarakat dalam berpolitik.

Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung kerja kelembagaan. Hukum menjadi portal utama dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ditangani lembaga, kemudian Humas menjadi kontrol publikasi kinerja lembaga dan Data Informasi menjadi pusat data dan informasi yang diperoleh dari berbagai divisi, kemudian diolah agar bisa dikonsumsi oleh publik.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2021 tidak terlepas dari kontribusi Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi, seperti halnya proses penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah Peraturan Bawaslu, kemudian Publikasi setiap Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Cilacap, dan penyusunan Daftar Informasi Publik untuk Layanan Informasi Publik PPID Bawaslu Kabupaten Cilacap. Hasil pencapaian dari Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi selama tahun 2021 kami tuangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Tahun 2021. Laporan ini menjadi titik balik untuk mengevaluasi kinerja divisi tahun 2021 dan untuk memaksimalkan capaian kinerja pada tahun 2022.

BAB II
TUGAS DIVISI
HUKUM, HUMAS DAN DATA INFORMASI

Pemilu/Pemilihan merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemilu tanpa hadirnya pengawasan yang kokoh berpotensi besar menimbulkan hilangnya hak pilih warga negara, perbedaan sumber data pemilih, konflik sosial politik, maraknya politik uang, kampanye hitam dan penyelenggaraan pemilihan yang tidak sesuai dengan aturan, berdampak pada timbulnya sengketa dan gugatan hasil pemilihan. Sebagai mekanisme demokrasi, pemilihan didesain agar kontestasi politik menjadi lebih kompetitif dan penuh integritas dengan tujuan akhir menghasilkan pemimpin dengan legalitas dan legitimasi yang tidak lagi diragukan.

Kehadiran Bawaslu sebagai jawaban terhadap tuntutan masyarakat dalam pengawasan dan penindakan atas pelanggaran sepanjang proses penyelenggaraan pemilihan. Terselenggaranya Pemilu/Pemilihan yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil melalui pelaksanaan beberapa tugas dan fungsi sesuai dengan. Perbawaslu No. 3 Tahun 2020 tentang Pola Hubungan dan/atau Dokumen Perencanaan.

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Cilacap mempunyai 5 Divisi, salah satunya Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi, Hal tersebut sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 1 tahun 2020 tentang tata kerja dan pola hubungan badan pengawas pemilihan umum, badan pengawas pemilihan umum provinsi, badan pengawas pemilihan umum kabupaten/kota, panitia pengawas pemilihan umum kecamatan, panitia pengawas pemilihan umum kelurahan/desa, panitia pengawas pemilihan umum luar negeri, dan pengawas tempat pemungutan suara.

Pada Pasal 25 ayat (2) Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 berbunyi bahwa Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b angka 2 mengkoordinasikan fungsi:

- a. Penyiapan Analisis dan Kajian Hukum
- b. Pendokumentasian dan Sosialisasi Produk Hukum.
- c. Koordinasi internal dan koordinasi dengan Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dalam:
 1. Pelaksanaan pendampingan hukum dalam perselisihan hasil Pemilu dan perselisihan hasil Pemilihan;
 2. Pengelolaan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan; dan
 3. Pengelolaan basis data Bawaslu Kabupaten/Kota.
- d. Hubungan Masyarakat;
- e. Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota;

- f. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang hukum, hubungan masyarakat, pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan/atau data informasi;
- g. Pemantauan dan evaluasi; dan
- h. Penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi.

Peran Divisi Humas di dalam lembaga juga sangat penting, yaitu menjaga hubungan antara lembaga dengan publiknya, sehingga dapat meningkatkan eksistensi Bawaslu. Maka dari itu keberadaan Divisi Humas dalam sebuah lembaga sangat diperlukan untuk membantu memperkenalkan Bawaslu. Dengan memaksimalkan kinerja dari Divisi Humas bisa menciptakan dan mempertahankan citra positif bagi lembaga, sehingga lembaga bisa semakin dikenal dan dipercaya oleh publiknya.

Peran Divisi Humas di dalam Bawaslu diantaranya ialah, melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Umum. Kegiatan dari Divisi Humas tentu harus sesuai dengan perencanaan strategis, karena peran Divisi Humas memang dirancang untuk memperkenalkan, memberitahu masyarakat mengenai aktivitas Bawaslu. Dapat disimpulkan, bahwa sebenarnya peran sebagai jembatan antara Bawaslu dan masyarakat.

Kehumasan Bawaslu Cilacap mempunyai peran penting dalam membuka ruang bagi publik untuk mendapatkan akses informasi. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat melalui media apabila tidak akurat, cepat, dan mudah, maka dapat menyebabkan pelaksanaan kebijakan pada program kegiatan di Bawaslu Kabupaten Cilacap dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat dikatakan tidak informatif. Bawaslu Cilacap selalu berusaha menjembatani antara lembaga dan masyarakat untuk bersinergi dalam menciptakan iklim transparan dan juga informatif.

Pada era globalisasi saat ini, eksistensi kinerja Badan Pengawas Pemilu ditampakkan melalui publikasi kehumasan, banyak orang yang belum mengetahui tugas dan fungsi dari Badan Pengawas Pemilu atau yang biasa disebut dengan Bawaslu. Menurut pandangan masyarakat umum mengenai Bawaslu adalah sebuah lembaga yang hanya mengawasi pada saat proses tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum. Untuk meningkatkan eksistensi di era globalisasi, Bawaslu perlu melakukan terobosan sosialisasi agar lebih dikenal oleh masyarakat luas.

BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA
DAN SARANA PRASARANA HUMAS

A. SUMBER DAYA MANUSIA HUMAS

Divisi Humas mempunyai banyak fungsi penting dalam rangka pencapaian tujuan atau cita-cita dari suatu lembaga. Fungsi Divisi Humas di dalam lembaga adalah sebagai berikut :

1. *Branding*

Fungsi Divisi Humas dalam sebuah lembaga salah satunya adalah menciptakan *branding*. Hal ini bisa dilakukan dengan cara sebagai fasilitator komunikasi bagi lembaga. Dengan bertindak sebagai komunikator atau mediator yang akan membantu pihak manajemen dalam hal mendengarkan apa yang diinginkan dan diharapkan oleh publiknya.

2. *Building*

Fungsi Divisi Humas di lembaga adalah membangun identitas dan menciptakan citra bagi lembaga (*building corporate identity and image*). Peran ini bertujuan agar sebuah lembaga lebih dikenal oleh masyarakat, sehingga masyarakat jadi mengetahui bahwa ada lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang yang terfokus.

3. Menjaga Hubungan Internal dan Eksternal

Divisi Humas diartikan sebagai fungsi manajemen yang bertugas menciptakan dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara lembaga dengan publiknya

Kehumasan Bawaslu memiliki fungsi mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan citra dan reputasi Lembaga, dalam rangka membangun jembatan sosialisasi yang baik dan membangun hubungan yang menguntungkan antar *stakeholders* serta membangun kepercayaan publik. Humas juga harus berupaya untuk menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat. Sesuai dengan fungsi humas yakni bertanggung jawab untuk menjaga citra positif lembaga dan berperan menginformasikan semua program kerja dan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu.

Divisi Humas juga berperan menjaga hubungan baik antara lembaga dengan publiknya, juga untuk menciptakan citra positif bagi lembaga, dan menjadi informan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga, serta menciptakan identitas bagi lembaga. Pentingnya Divisi Humas di suatu lembaga perlu disadari oleh Bawaslu, karena fungsi dan peran Divisi Humas mampu membantu lembaga untuk meningkatkan eksistensi dan dapat menciptakan citra positif bagi lembaga.

Sosialisasi yang digunakan tidak hanya melalui pertemuan tatap muka namun perkembangan teknologi dan informasi saat ini juga dapat dimanfaatkan oleh Bawaslu untuk dijadikan sebagai wadah sosialisasi agar lebih dikenal oleh masyarakat. Karena tidak dapat dipungkiri di era globalisasi saat ini teknologi informasi lebih efektif untuk membentuk sebuah *value* di masyarakat, mengingat jumlah pengguna teknologi informasi saat ini juga semakin luas jangkauannya.

Fungsi teoritis diatas harus didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang bisa mengikuti peran kehumasan di era sekarang, peningkatan kapasitas SDM yang sesuai dengan kebutuhan di lembaga sangat dibutuhkan untuk menunjang program kerja lembaga. Kehumasan tanpa adanya dukungan data dalam hal ini mustahil bisa menjadi lembaga yang informatif, maka pola hubungan kerja antar divisi di Lembaga Bawaslu Cilacap menjadi hal yang harus bisa bersinergi dalam rangka menyiapkan dokumen dokumen lembaga yang bersifat cepat akurat, transparan dan informatif.

Sumber Daya Manusia (SDM) Humas Bawaslu Kabupaten Cilacap secara umum didukung oleh semua yang terlibat di dalam kesekretariatan. hal ini didasarkan pada sumber dokumen yang berasal dari laporan hasil kinerja masing-masing Divisi pada tahun 2021. SDM Humas secara khusus di bawah kewenangan staf humas yang membidangi dokumentasi dan inventarisasi kegiatan dalam bentuk data digital. Keterbatasan SDM yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap tentu tidak sampai membatasi ruang kreatifitas yang harus selalu di bangun lembaga dalam rangka mengemas sajian informasi yang uptodate dan kekinian sesuai perkembangan zaman.

Berikut data SDM Humas Bawaslu Cilacap dari tahun 2018 s/d 2021

Tabel 3.1 Statistic Pengunjung Website cilacap.bawaslu.go.id

Tahun	Nama	Kemampuan
2018	Galang Luh Prasetyo	Administrasi Negara
2019	Muhammad Abdul Fattah	Teknologi Informasi
	Bangun Priyantoso	Hukum
2020	Muhammad Abdul Fattah	Teknologi Informasi
2021	Muhammad Abdul Fattah	Teknologi Informasi
	Sansan Sanjaya	Administrasi Negara

B. SARANA DAN PRASARANA HUMAS

Dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan, adanya sarana dan prasarana tentunya sangat membantu kelancaran serta efisiensi prosesnya. Pada dasarnya, fungsi dari sarana dan prasarana bergantung pada penggunaan dan bidangnya. Artinya antara bidang yang satu dengan lainnya, akan membutuhkan sarana dan prasarana yang berbeda, sarana dan prasarana mempunyai empat fungsi utama, yakni:

1. Mempermudah proses kerja Sarana dan prasarana berfungsi untuk mempermudah proses kegiatan, supaya tujuan bersama dapat tercapai.
2. Mempercepat proses kerja Selain mempermudah, adanya sarana dan prasarana juga mempercepat proses kerja suatu organisasi atau lembaga.
3. Meningkatkan produktivitas Produktivitas kegiatan dapat meningkat karena terbantu oleh adanya sarana dan prasarana. Hasilnya lebih berkualitas Oleh karena produktivitas meningkat, hasil kerja juga lebih berkualitas. Karena adanya sarana dan prasarana dapat mempermudah serta mempercepat proses kerja.
4. Berpengaruh pada kualitas hasil , dengan proses yang lebih efektif dan adanya peningkatan produktivitas tentu akan mempengaruhi hasil yang maksimal

Dalam hal sarana prasarana diartikan sebagai alat langsung yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan prasarana berarti alat tidak langsung yang dimanfaatkan untuk meraih tujuan. Dalam hal ini standar sarana dan prasarana yang ada di Bawaslu Cilacap untuk menopang kinerja divisi kehumasan secara ideal belum terbilang terpenuhi, jika mengikuti standar kinerja yang diharapkan oleh sebuah lembaga.



Gambar 3.1 Sarana Prasarana

Berikut Data sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Bawaslu Cilacap dari Tahun 2018 sampai 2021

1. Sarana yang sudah ada dan Kondisi

Tabel 3.2 Sarana yang sudah ada dan Kondisi

Alat yang dimiliki	Jumlah	Kondisi
Kamera DSLR	1 Unit	Baik
Handycam Sony	2 Unit	Baik
Mixer	1 Unit	Sedang
Mic Kabel	1 Unit	Sedang
Speaker	2 Unit	Baik
Clipon	1 Unit	Rusak
Kabel RCA 3,5	4 Unit	Baik
HDMI Capture	1 Unit	Rusak
HDMI to Mini HDMI	2 Unit	Baik
SD Card	3 Unit	Baik
Tripod	1 Unit	Baik

2. Sarana yang Belum Ada

Tabel 3.3 Sarana yang Belum Ada

Alat yang Belum Ada	Jumlah
Mic Wireles	2 Unit
Komputer Streaming	1 Unit
Switcher	1 Unit
Tripod	2 Unit
Lighting	2 Unit
Mic Kamera (Untuk Shooting)	1 Unit
Webcam	1 Unit
Kabel Roll Outdoor	1 Unit

BAB IV

PUBLIKASI PEMBERITAAN DAN MEDIA SOSIAL

A. PLATFORM MEDIA BAWASLU CILACAP DAN PERKEMBANGANYA

Pesatnya kemajuan dibidang teknologi informasi dan komunikasi sebagai ciri khas globalisasi telah mendorong banyak instansi memakai media sosial sebagai sarana publikasi yang efektif mengingat masifnya jumlah media sosial di indonesia khususnya di kalangan generasi muda.

Berbagai platform media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook dan Youtube, digunakan Bawaslu Cilacap sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan publik. penggunaan *platform* media sosial tersebut diharapkan dapat membantu publik untuk mengetahui kegiatan dan regulasi yang Bawaslu sajikan, sekaligus untuk memetakan opini dan menerima masukan publik atas kegiatan yang dilakukan.

Pemberitaan merupakan salah satu media publikasi Bawaslu Cilacap kepada masyarakat dalam pembentukan Citra. Citra positif penting dibentuk untuk menumbuhkan kepercayaan khalayak. Pemberitaan di media mainstream maupun media sosial yang ada di lembaga Bawaslu masih menarik untuk diangkat dalam upaya membangun citra positif atas lembaga. Media yang ada di Bawaslu memiliki peran sebagai pihak yang berkompeten menginformasikan pesan pesan kepada khalayak yang bersifat sosialisasi dan mengedukasi.

Kontribusi pemberitaan di media bawaslu paling dirasakan tatkala mengelola unsur eksternal yang berasal dari internal lembaga (dalam hal ini media) memiliki dampak yang lebih kuat terhadap khalayak karena lebih berkualitas, efisien dan efektif sesuai dengan perkembangan zaman dan bermanfaat antara lain untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Bawaslu, serta memberi pengaruh dan membentuk opini dengan dukungan Anggaran yang ada

Bawaslu Cilacap selalu berupaya mempublikasikan kinerja pada media sosial yang dikelola, baik dokumen yang bisa diakses lewat kanal PPID maupun, publikasi langsung yang disajikan lewat Bulletin Cahaya Pemilu berupa hardfile maupun softfile, media website, Youtube, Instagram, facebook, twitter, maupun pembuatan konten konten sederhana sebagai bentuk kreatifitas kehumasan. Dalam Upaya melaksanakan publikasi kinerja pada media yang ada tentu mengalami dinamika pada setiap proses publikasi. Berikut platform media yang ada di bawaslu dengan perkembangan dari tahun ke tahun.

1. Buletin Bawaslu Cilacap

Saat ini fenomena perkembangan teknologi informasi sangat pesat, sehingga sudah menjadi konsumsi masyarakat luas, salah satu pemanfaatan teknologi informasi adalah internet. Di tengah-tengah zaman Dunia dalam Genggaman, Bawaslu Kabupaten Cilacap masih memanfaatkan media cetak sebagai salah satu media informasi dan publikasi kegiatan. Hal ini masih dianggap penting karena media cetak tidak semudah itu dapat tersingkir dari literatur manusia. Setidaknya untuk saat ini tidak ada yang menggantikan sensasi dan aroma buku cetak, apalagi yang baru dibeli. Tidak semua orang nyaman membaca bacaan dalam layar karena masalah radiasi cahaya dan aspek berbahaya bagi kesehatan mata. Tidak setiap daerah mempunyai akses untuk mendapatkan perangkat elektronik dan jaringan internet yang memadai, apalagi mudah mendapatkan bacaan cetak. Tentu masih banyak faktor-faktor lainnya yang meragukan bacaan elektronik atau pemerataan infrastruktur teknologi itu sendiri. dengan alasan tersebut maka Bawaslu cilacap masih menggunakan media cetak sebagai alat sosialisasi dalam mempublikasikan kegiatan, akan tetapi selain menggunakan media cetak Bawaslu Cilacap juga menyediakan layanan informasi berupa *digital library* yang bisa di akses di kanal PPID Bawaslu Cilacap,

Buletin Bawaslu Cilacap dengan Nama Buletin Cahaya Pemilu mulai terbit pertama edisi 1 pada semester II Tahun 2019, edisi Bulan Juli sd Desember 2019. Buletin edisi pertama ini memuat tentang kegiatan pasca pemungutan suara Pemilu tahun 2019. Pada Edisi Pertama di semester kedua tahun 2019 ini, Bawaslu Cilacap mencetak dengan 34 halaman *full color* dengan pendistribusian kepada *stakeholder* di lingkungan kerja Bawaslu Kabupaten Cilacap.

Pada Edisi kedua dan ketiga Bawaslu Cilacap memproduksi buletin Cahaya Pemilu di Tahun 2020 di tengah tengah Negara kita yang sedang dilanda pandemik Covid-19, seperti kita ketahui bersama jika pada tahun 2020 Cilacap adalah salah satu Kabupaten dari 14 kab/kota, tidak melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dari 35 Kab/Kota di provinsi Jateng.

Sebagai wilayah yang tidak menggelar Pilkada maka lembaga yang terbentuk relative baru dituntut untuk tetap eksis di tengah kondisi pandemik, dengan melakukan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik menggunakan media sosial yang ada di Bawaslu Kabupaten Cilacap.

Pada edisi ke 4 dan 5 Buletin Cahaya Pemilu terbit di Tahun 2021, dengan Tema masih seputar Pendidikan Politik kepada Masyarakat. Berikut ini tabel rincian penerbitan Buletin Cahaya Pemilu beserta link yang bisa diakses via Internet.

Tabel 4.1 Buletin Bawaslu Cilacap

Tahun	Edisi	Link buletin
2018	-	-
	-	-
2019	1	https://drive.google.com/file/d/1ed_VWAr0Kg_vWCYZ84M__nJNGIL_a52r/view
	2	https://drive.google.com/file/d/1woSEIKCnCyRjMsYtv7dt-m1sTMwV5D-/view
2020	3	https://drive.google.com/file/d/1XuKoYIh6Bf8DvDmMcxPWOtNQHYtHX03/view
2021	4	https://drive.google.com/file/d/1knoVi05YgJrFagc28cqq5zzfbr14104h/view
	5	https://drive.google.com/file/d/1Rh2fx_8hBN0th-mc_DoE0M98mjo3BgGj/view

2. Website Bawaslu Cilacap

Literasi Media yang sering menjadi rujukan oleh pembaca yaitu website. Penggunaan Website menjadi dasar untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik. melalui platform Website publik lebih mudah mendapatkan informasi yang valid berdasarkan hasil pencarian yang diberikan oleh mesin pencari seperti google, bing, dsb. dengan adanya publikasi melalui website lembaga secara rutin, sehingga lembaga dapat melakukan counter terhadap berita hoax yang dapat menimbulkan gejolak di masyarakat.

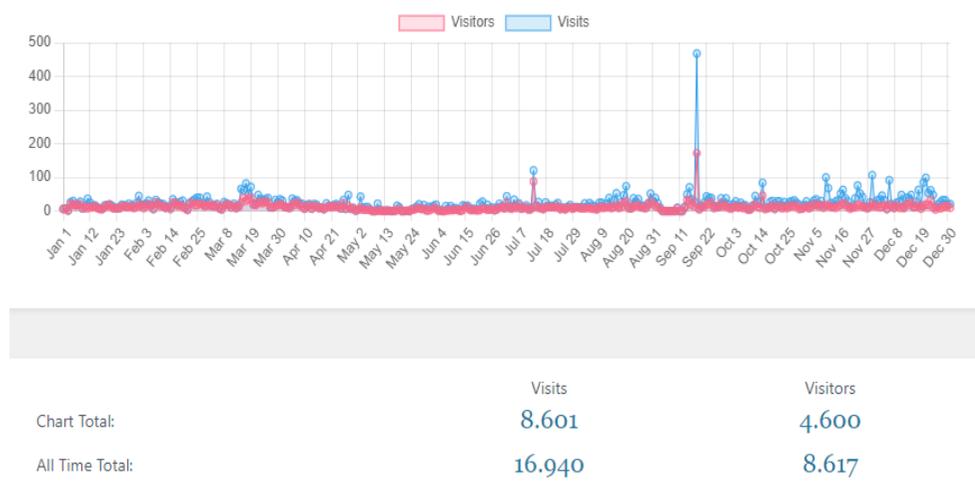
Bawaslu Kabupaten Cilacap Mempunyai tiga jenis website diantaranya :

- Website utama yang beralamat : www.cilacap.bawaslu.go.id merupakan hasil dari pengembangan Website pada tanggal 22 April 2019 dengan CV. Arthama Websolution Semarang



Gambar 4.1 Tampilan Website Utama

Kemudian dilakukan pengembangan ulang pada tahun 2020 oleh staf Bawaslu Cilacap untuk memaksimalkan berbagai fitur yang relevan dengan publikasi kelembagaan, memaksimalkan kemudahan akses untuk pengguna dan meningkatkan sensitifitas *crawling* oleh *google search engine*. Website utama menjadi sarana publikasi terkait dengan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap. Jumlah seluruh postingan berita sampai dengan Tahun 2021 sebanyak : 650 berita, dan untuk statistik jumlah pengunjung selama 2021 sebagai berikut :



Gambar 4.2 Statistik Pengunjung Website Utama

Sumber : https://cilacap.bawaslu.go.id/wp-admin/admin.php?page=wps_hits_page&from=2021-01-01&to=2021-12-31

Berikut rincian jumlah pemberitaan dan publikasi serta page :

Tabel 4.2 Rincian Jumlah Pemberitaan

Aspek	2018	2019	2020	2021
Jumlah pemberitaan	9 Berita	177 berita	284 berita	186 Berita
Page view	100	5200	7500	8601

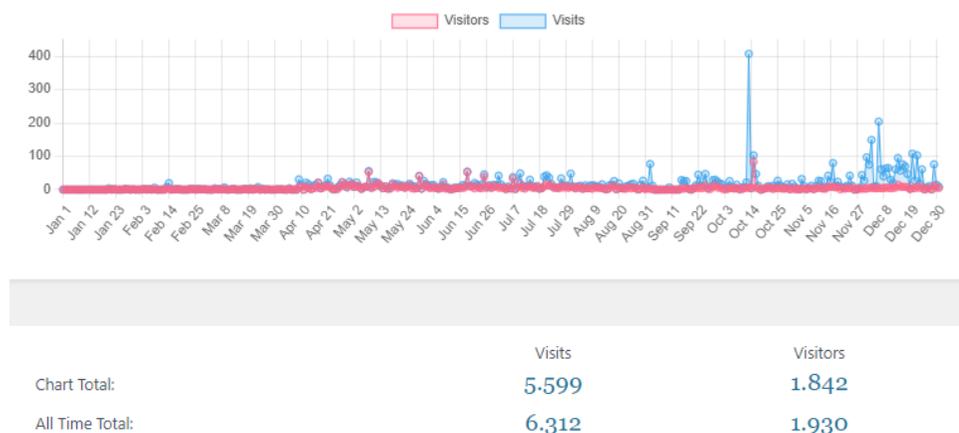
Dengan layanan informasi yang selalu terupdate diharapkan publik secara khusus dilingkungan Kabupaten Cilacap dapat terfasilitasi dan menjawab pertanyaan yang muncul di masyarakat

- b. Website Layanan Informasi yang beralamatat : www.ppid.cilacap.bawaslu.go.id merupakan website layanan informasi yang disediakan Bawaslu Kabupaten Cilacap sebagai upaya peningkatan Keterbukaan Informasi Publik.



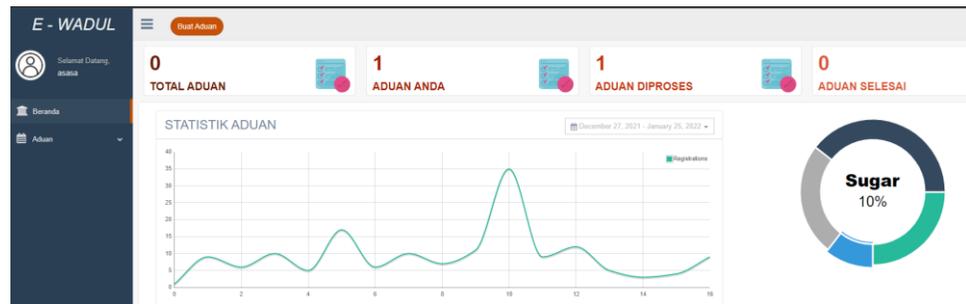
Gambar 4.3 Statistik Pengunjung Website Utama

Website PPID sudah dikembangkan pada tahun 2019, dan dikembangkan ulang pada tahun 2020 dengan perbaikan dari sisi tampilan antarmuka pengguna yang lebih responsif dengan berbagai rasio layar perangkat, kemudian di tahun 2020 akhir dikembangkan kembali dengan pihak ketiga secara keseluruhan untuk mendapatkan halaman website *full width*. untuk statistik jumlah pengunjung selama 2021 sebagai berikut :



Gambar 4.4 Statistik Website PPID

- c. Website e-wadul yang beralamat : ewadul.cilacap.bawaslu.go.id merupakan hasil dari pengembangan dengan pihak ketiga bersamaan dengan pengembangan website PPID pada tahun 2020, website e-wadul mengusung konsep layanan aduan dari masyarakat terkait pelanggaran yang terjadi pada saat tahapan berlangsung. laporan tersebut menjadi langkah percepatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap agar hasil dari pengawasan dan penindakan lebih maksimal.



Gambar 4.5 Website e-wadul

3. Youtube

Channel youtube Bawaslu Kabupaten Cilacap yang mempunyai nama Bawaslu Cilacap dibangun pada tanggal 10 Maret 2019 dengan jumlah video yang sudah terupload sebanyak 48 video. Channel youtube menjadi point penting dalam menyampaikan program kerja kepada masyarakat, mengingat channel youtube mempunyai kemasan yang lebih baik dari sisi visibilitas, available, dan validitas data. Pada tahun 2021 evolusi industri teknologi berkembang pesat karena adanya efek disrupsi, kondisi ini menuntut adanya interaksi secara virtual. Sehingga melalui channel youtube, Bawaslu Kabupaten Cilacap membuat program unggulan yaitu Obrolan Bawaslu Seputar Demokrasi atau Obsesi dan sudah berjalan sampai dengan edisi ke- 31 pada tahun 2021. Berikut tabel rincian publikasi konten dan subscriber serta pengunjung youtube bawaslu cilacap.

Tabel 4.3 Rincian Publikasi Youtube

Aspek	2018	2019	2020	2021
Jumlah konten	-	-	13	16
Subscriber	-	-	162	356
Dikunjungi	-	-	2711	2599

4. Instagram

Media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini. Kepraktisan dan beragam fasilitas yang ditawarkan oleh media sosial menjadi daya tarik yang memikat orang-orang untuk terus menggunakannya sebagai sarana komunikasi serta berbagi informasi dengan cepat dan mudah. Salah satu media sosial yang sangat digemari oleh generasi milenial adalah Instagram, maka dari itu salah satu upaya Bawaslu Cilacap untuk menginformasikan semua program kerja dan kebijakan yang telah dilaksanakan melalui media sosial ini, harapannya melalui aplikasi media sosial ini terjalin hubungan yang baik dengan masyarakat dan juga generasi milenial yang menggunakan media sosial ini bisa ikut serta menyebarkan informasi-informasi di dalamnya, bagi pengguna Instagram yang mau mencari informasi terkait Bawaslu Cilacap bias mengunjungi [@bawaslucilacap](https://www.instagram.com/bawaslucilacap) Instagram Bawaslu Kabupaten Cilacap mulai aktif melaksanakan publikasi di instagram sejak dibuat pada tanggal 13 Desember 2017, Total publikasi di instagram sudah mencapai 555 postingan. Publikasi Instagram selama Tahun 2020 dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 sampai upload terakhir tanggal 31 Desember 2021 Total Upload informasi melalui instagram selama 137. Konten dalam instagram berupa foto kegiatan, flyer kegiatan, flyer ucapan hari besar, video kegiatan dan video berita baik dari internal maupun dari media lain yang mempublikasikan Bawaslu Kabupaten Cilacap. Selain untuk publikasi, media sosial Bawaslu Cilacap juga sebagai media untuk berinteraksi dengan masyarakat. Banyak masyarakat yang bertanya melalui kolom komentar maupun pesan masuk instagram. Berikut rincian dalam tabel

Tabel 4.4 Rincian Publikasi Instagram

Aspek	2018	2019	2020	2021
Jumlah konten	99	156	163	137
Follower	569	902	1107	1.285

5. Fanspage facebook

Aplikasi Facebook merupakan aplikasi yang banyak dipergunakan oleh masyarakat terutama di Indonesia, bukan hanya digunakan oleh kaum milenial bahkan aplikasi ini digunakan oleh semua usia dan semua kalangan, Tujuan para pengguna facebook berbeda-beda, bukan hanya sebagai alat komunikasi dengan sesama pengguna, ada pengguna facebook yang menggunakan akunya untuk bermain game, berdagang, bahkan berdakwah. Jangkauan komunikasi sesama pengguna aplikasi ini bukan hanya di Indonesia bahkan di seluruh dunia, oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Cilacap memanfaatkan aplikasi ini untuk mempublikasikan semua kegiatan, memberikan informasi terkini yang berkaitan dengan aktivitas kegiatan pelaksanaan program lembaga dan bertukar informasi dengan masyarakat. Untuk memperoleh informasi kegiatan terkini Bawaslu Kabupaten Cilacap pengguna Facebook bisa mengunjungi akun Facebook Bawaslu Cilacap [@bawaslucilacap](#) Fanspage facebook Bawaslu Kabupaten Cilacap yang mempunyai nama akun @bawaslucilacap mulai aktif melaksanakan publikasi di *fanspage* facebook sejak dibuat pada tanggal 13 Desember 2017 total publikasi di *fanspage* facebook sudah mencapai 463 postingan. Publikasi *fanspage* facebook selama Tahun 2021 dimulai pada tanggal 1 Januari 2020s ampai *upload* terakhir tanggal 31 Desember 2021. Total upload informasi melalui fanspage facebook selama 2021 berjumlah 137 postingan. Konten dalam fanspage facebook berupa foto kegiatan, flyer kegiatan, flyer ucapan hari besar, video kegiatan dan video berita baik dari internal maupun dari media lain yang mempublikasikan Bawaslu Kabupaten Cilacap. Selain untuk publikasi, media sosial Bawaslu Cilacap juga sebagai media untuk berinteraksi dengan masyarakat. Banyak masyarakat yang bertanya melalui kolom komentar maupun pesan masuk. Berikut kami tabel yang memuat jumlah konten dan follower.

Tabel 4.5 Rincian Publikasi Fanspage Facebook

Aspek	2018	2019	2020	2021
Jumlah konten	34	129	163	137
Follower	257	542	874	994

6. Twitter

Twitter Bawaslu Kabupaten Cilacap yang mempunyai nama akun @BawasluCilacap mulai aktif melaksanakan publikasi di instagram sejak dibuat pada tanggal 13 Desember 2017 Total publikasi di twitter sudah mencapai 555 postingan. Publikasi Instagram selama tahun 2021 dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 sampai upload terakhir tanggal 31 Desember 2021, total upload informasi melalui instagram selama tahun 2021 berjumlah 137 postingan. Konten dalam instagram berupa foto kegiatan, flyer kegiatan, flyer ucapan hari besar, video kegiatan dan video berita baik internal maupun media lain yang mempublikasikan Bawaslu Kabupaten Cilacap. Selain untuk publikasi, media sosial Bawaslu Cilacap juga sebagai media untuk berinteraksi dengan masyarakat. Berikut tabel rincian dalam tabel jumlah konten dan follower.

Tabel 4.6 Rincian Publikasi Twitter

Aspek	2018	2019	2020	2021
Jumlah konten	99	156	163	137
Follower	569	902	1107	1.285

7. Konten

Di era digital seperti saat ini, konten memainkan peran yang penting dalam dunia publikasi, Bawaslu Kabupaten Cilacap berusaha semaksimal mungkin dalam rangka membuat media dan sarana sosialisasi yang menarik dan kekinian yaitu dengan menggunakan konten sebagai sarana yang cukup efektif di era digital sekarang yaitu berupa acara/program talkshow OBSESI (Obrolan Seputar Demokrasi). Pembuatan Poster/flyer/upload berita di website, mengadakan siaran pers ,dan juga membuat film pendek dalam bentuk iklan Layanan Informasi (ILM) Berikut rincian dalam tabel :

Tabel 4.7 Rincian Konten

Jenis konten	2018	2019	2020	2021
Talkshow	-	-	13 Kali	18 Kali
Poster/flyer	16 flyer	93 flyer	108 flyer	69 flyer
Berita di website	9 Berita	177 Berita	284 Berita	186 Berita
Siaran pers	-	1 kali	-	-
Film	-	-	-	-
ILM	-	-	-	-
JUMLAH	-	-	13 Kali	18 Kali

B. KEGIATAN LAIN TERKAIT KEHUMASAN

Dalam melaksanakan program kerja Divisi Hukum Humas dan Data Informasi secara pelaksanaan selalu bersama dengan divisi lainnya saling berkoordinasi dan tidak lepas dengan program lembaga. Sebagai divisi yang membidangi kehumasan tentu harus mampu menjembatani kepentingan lembaga dengan kepentingan publik. dalam hal ini Humas harus mampu menjadi pelopor dalam perencanaan, tidak sekedar kepentingan lembaga akan tetapi harus mampu menciptakan lingkungan yang saling menguntungkan antara lembaga dan Publik.

Program dan realisasi program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh divisi Hukum Humas dan data informasi Bawaslu kabupaten Cilacap pada Tahun 2021 mengacu pada Perencanaan Program lembaga yang telah disepakati bersama dengan 5 Divisi yang ada di Internal Organisasi. Dalam hal capaian program tidak lepas dari realisasi program yang telah terlaksana. Dalam Realisasi program di Bawaslu Kabupaten Cilacap, baik program yang berbasis anggaran maupun program kerja yang tidak berbasis anggaran.

Berikut kegiatan Divisi Humas Bawaslu Cilacap :

1. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia {SDM} kehumasan di bawaslu Kabupaten Cilacap, yang keberadaannya sangat terbatas tentu tidak menjadi tolak ukur dalam menjalankan capaian kinerja, maka setiap secara garis besar setiap anggota dan staf di lembaga Bawaslu Cilacap adalah Humas bagi lembaga itu sendiri, sehingga seluruh personal yang ada di lembaga Bawaslu cilacap adalah bagian penting yang harus mendapatkan materi tentang kehumasan dan Ilmu pengembangan kehumasan, walaupun secara khusus dan teknis kerja, staf Humaslah yang bekerja sesuai bidangnya. Peningkatan kapasitas yang dilaksanakan di Bawaslu Cilacap ini, meliputi Pengetahuan terkait kehumasan, dan juga teknik jurnalistik dasar, serta teknik fotografer, teknik pengambilan video shooting dan editing tingkat dasar.

2. Publikasi Pemberitaan pada media sosial Bawaslu Cilacap

Humas Bawaslu Cilacap melaksanakan publikasi dan pemberitaan setiap program kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga, melalui media sosial yang ada, maupun mempublikasikan kepada media lain sebagai partner. Publikasi ini dalam rangka mensosialisasikan kegiatan kepada publik. Media sosial Bawaslu Kabupaten Cilacap yang digunakan adalah, halaman Website, Fanspage Facebook, Twitter, Instagram, Youtube dan juga Grup grup Whatsapp yang terbagi menjadi berbagai komunitas internal maupun eksternal.

3. Layanan Informasi

Humas Bawaslu Cilacap juga memberikan layanan informasi bagi publik dalam kanal PPID yang menyajikan data dan informasi berupa dokumen yang dikemas dalam Daftar Informasi Publik, yang bisa di akses secara langsung dan juga lewat fitur download yang tersedia di menu PPID. selain itu publik juga bisa memberikan pertanyaan dan mengajukan pertanyaan yang bisa dilayani lewat media sosial yang ada. maupun datang ke kantor sekretariat di Desk PPID yang tersedia di ruang PPID.

Kegiatan dan program yang telah dicapai Divisi Humas dalam menyajikan informasi kepada publik tentu masih belum maksimal karena kurangnya dukungan SDM yang belum sepenuhnya mendukung dan juga suport alat yang terbatas. seperti pada publikasi dengan konten konten video film pendek maupun Iklan Layanan Masyarakat. keterbatasan SDM dalam bidang tersebut tidak bisa maksimal dalam memproduksi dalam bentuk konten tersebut.

Minimnya Sumber Daya Manusia dalam bidang tertentu seperti memproduksi Film pendek dan (Iklan Layanan Masyarakat) ILM tentu tidak mengurangi capaian kinerja yang telah terlaksana. Humas Bawaslu Cilacap Berusaha melaksanakan terobosan dan inovasi program dalam upaya menjembatani komunikasi lembaga dan juga publik dengan terus berupaya bersosialisasi baik secara daring dan luring

Dalam hal inovasi program Bawaslu Cilacap telah membuat program Live streaming dalam bentuk Obrolan Seputar Demokrasi (OBSESI) yang ditayangkan setiap dua minggu sekali lewat media Youtube Bawaslu Cilacap. Program ini sudah tayang pada tahun 2021 sejumlah 34 episode yang pada tiap tayangnya mengulik hal yang berkaitan dengan regulasi pemilu dan pemilihan maupun terkait kelembagaan.

BAB V

CAPAIAN DIVISI HUKUM

A. ADVOKASI BANTUAN HUKUM DAN DOKUMENTASI HUKUM

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 saat ini memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara. Saat ini dan ke depan, terbentang tantangan historis bagi Bawaslu untuk membuktikan peran dan eksistensi strategisnya mengawal pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa. Reformasi politik pasca reformasi melalui gerakan rakyat (people power) Mei 1998 berhasil menumbangkan Orde Baru. Lahir dari kenyataan, bahwa selama rezim Orde Baru, rakyat Indonesia merasakan kekecewaan akibat praktik demokrasi prosedural. Hal itu seperti penyelenggaraan Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 yang tidak sesuai dengan asas dan prinsip pemilu demokratis. Dalam konteks Indonesia yang sedang membangun peradaban politik yang sehat, pelaksanaan pemilu tanpa hadirnya pengawasan secara struktural dan fungsional yang kokoh berpotensi besar akan menimbulkan hilangnya hak pilih warga negara, maraknya politik uang, kampanye hitam, dan pemilu yang tidak sesuai aturan.

Salah satu fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Terdapat fungsi Bawaslu yang strategis dan signifikan, yakni bagaimana menghindari potensi pelanggaran pemilu muncul dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal. Bawaslu juga diharapkan mampu melakukan penindakan tegas, efektif, dan menjadi hakim pemilu yang adil. Secara historis, kelahiran Bawaslu diharapkan dapat mendorong dan memperkuat pengawasan masyarakat dengan memberikan penguatan berupa regulasi, kewenangan, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana. Agar berperan efektif, setiap laporan pengawasan dapat lebih tajam dan menjadi fakta hukum yang dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme regulasi yang ada serta mampu memberikan efek jera bagi upaya mengurangi potensi pelanggaran sehingga tujuan keadilan pemilu dapat tercapai.

Bawaslu harus hadir menjadi solusi terhadap berbagai tuntutan untuk melakukan pengawasan dan penindakan atas berbagai pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh siapapun, termasuk kepada penyelenggara pemilu karena mereka tidak luput dari potensi melakukan pelanggaran. Terlebih jika integritasnya tidak cukup baik, tentu mereka tidak akan mampu menghadapi godaan dari berbagai pihak. Dalam kontestasi pemilihan tidak bisa dipungkiri begitu saja, mungkin terjadi karena salah pemahaman dan juga kurang memahami regulasi yang ada seorang pengawas pemilu bisa bermasalah dalam menyelesaikan tugas pengawasan, penindakan pelanggaran, maupun penyelesaian sengketa proses pemilu, sampai berakibat hukum. Merujuk hal tersebut sesuai Pasal 2 Ayat (1) Perbawaslu Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Tata Cara

Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Cilacap yang berbunyi “Pemberian Bantuan Hukum oleh Bawaslu diberikan kepada Pengawas Pemilu, Pejabat dan Pegawai yang mendapatkan Permasalahan Hukum”

Bahwa pemberian bantuan hukum diberikan kepada mantan pengawas pemilu, mantan pegawai, dan pensiunan pegawai sepanjang berkaitan, dengan tugas dan kewajiban selama bekerja di lingkungan Bawaslu, bantuan hukum tersebut paling sedikit meliputi perdata, pidana, dan perkara tata usaha negara, Selain bantuan hukum dimaksud juga diberikan untuk perkara perkara a. kode etik, b. uji materiil Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, c. uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang;, d. pengaduan hukum;, e. konsultasi hukum f. alternatif penyelesaian sengketa; dan, g. permasalahan hukum lain yang melibatkan Bawaslu. Selanjutnya Pemberian Bantuan Hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dilaksanakan oleh bagian yang membidangi bantuan hukum pada Bawaslu Provinsi. Dalam hal Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat memberikan bantuan hukum, Bawaslu Kabupaten/Kota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dapat mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

Kita ketahui bersama untuk Kabupaten Cilacap beserta 35 Kab/Kota di Provinsi Jawa tengah tidak menyelenggarakan pilkada , sehingga bisa dikatakan tidak ada permasalahan hukum yang timbul dari pengawas pemilu dalam menjalankan tugas dan wewenang bawaslu yang berkaitan dengan pengawasan, penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu.

B. ANALISIS (KAJIAN HUKUM)

Kehadiran Bawaslu sebagai jawaban terhadap tuntutan masyarakat dalam pengawasan dan penindakan selama Pemilu/Pemilihan.Menganalisa Produk Hukum dan mengkaji dilakukan oleh Bawaslu dalam upaya memperbaiki dan juga mensinkronisasi peraturan terbaru, seperti melakukan kajian dengan cara meningkatkan kapasitas SDM internal baik yang dibiayai oleh anggaran maupun non anggaran

Beberapa kajian hukum yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap adalah Sinau bareng yang dilakukan oleh Unsur Pimpinan dan seluruh Staf dalam mengkaji UU No 7 Tahun 2017, UU no 10 Tahun 2016 dan juga Perbawaslu yang baru dikeluarkan atau regulasi lain yang masih berkaitan. Selain Melakukan Kajian hukum dengan sinau bareng, Bawaslu Cilacap juga menginventarisir daftar masalah yang terdapat pada Peraturan Bawaslu yang dianggap perlu untuk di inventarisir selanjutnya permasalahan yang sudah di kaji di usulkan ke Bawaslu Propinsi sebagai koordinator pengadministrasian Daftar Inventarisir masalah.

C. SOSIALISASI PRODUK HUKUM

Sosialisasi produk hukum menjadi salah satu langkah penting yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Cilacap dalam upaya pencegahan potensi pelanggaran. Sosialisasi ini tidak hanya terbatas pada jajaran pengawas baik ditingkat Kecamatan dan Desa, namun tentunya juga pada Aparatur Sipil Negara, *stakeholders*, media massa, dan tokoh masyarakat serta perwakilan Partai Politik dengan harapan dapat terus disebarluaskan kepada lingkungannya

Kehadiran Bawaslu sebagai jawaban terhadap tuntutan masyarakat dalam pengawasan dan penindakan selama Pemilu/Pemilihan. Sosialisasi produk hukum menjadi salah satu langkah penting yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Cilacap dalam upaya pencegahan potensi pelanggaran.

Sosialisasi ini tidak hanya terbatas pada SDM internal Bawaslu Kabupaten Cilacap, namun tentunya juga pada Aparatur Sipil Negara, *stakeholders*, media massa, dan tokoh masyarakat serta perwakilan Partai Politik dengan harapan dapat terus disebarluaskan kepada lingkungannya. Baik dengan menggunakan media daring maupun secara Tatap muka. Berikut tabel sosialisasi produk hukum yang dilaksanakan Bawaslu secara tatap muka :

Tabel 5.1 Sosialisasi Produk Hukum

No.	Jenis kegiatan	Waktu	Sasaran	Tujuan Kegiatan
1	Kegiatan Diskusi bersama dengan pegiat media sosial	4 Maret 2021	Pegiat Media Sosial di Kabupaten Cilacap	Mengajak para penggiat media sosial supaya memahami fungsi pengawasan pemilu dan pentingnya pengawas partisipatif untuk menciptakan kualitas Demokrasi dan ikut serta menjadi pengawas partisipatif
2	Sosialisasi dan pendampingan Desa pengawasan desa tritih kecamatan Cilacap	18 Maret 2021	Kepala Desa Perangkat Desa Tokoh Masyarakat, Agama, Pemuda dan Wanita	Kepala Desa, perangkat dan tokoh masyarakat memahami fungsi pengawasan pemilu dan pentingnya pengawas partisipatif untuk menciptakan kualitas Demokrasi
3	Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Dengan STIE Muhammadiyah Cilacap	29 Maret 2021	Mahasiswa STIE Muhammadiyah Cilacap	Menggandeng mahasiswa menjadi Pengawas Partisipatif
4	Diskusi Demokrasi dan Pengawasan Partisipatif bersama Mahasiswa STIE Muhammadiyah	30 Maret 2021	Mahasiswa STIE Muhammadiyah Cilacap	Mahasiswa STIE Muhammadiyah Cilacap memahami fungsi pengawasan pemilu dan pentingnya pengawas partisipatif

5	Rapat Koordinasi Pengembangan Desa Pengawasan tahun 2021 di Desa Nusawangkal	1 April 2021	Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Aktivistis Perempuan dan Karang Taruna	Kepala Desa, perangkat desa, karang taruna dan tokoh masyarakat memahami fungsi pengawasan pemilu dan pentingnya pengawasan partisipatif untuk menciptakan kualitas Demokrasi
6	Diskusi Pengawasan Partisipatif bersama Alumni SKPP Daring 2020	23 April 2021	Alumni SKPP Daring 2020	Memberikan pembekalan kepada peserta SKPP supaya memahami fungsi pengawasan pemilu dan pentingnya pengawasan partisipatif
7	Sinau Bareng " Buku Kesatu dan kedua Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum"	26 April 2021	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cilacap	Membedah UU 7 tahun 2017 yang menjadi pegangan bagi pengawasan pemilu
8	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bagi Pemilih Pemula	3 Mei 2021	Santri Al-Ihya Ulumaddin II Cilacap	Memberikan pemahaman kepada pemilih pemula terkait fungsi pengawasan pemilu dan pentingnya pengawasan partisipatif untuk menciptakan kualitas Demokrasi
9	Rapat Koordinasi Pengembangan Desa Anti Politik Uang Tahun 2021 Desa Jenang Kecamatan Majenang	17 Juni 2021	Rapat Koordinasi Pengembangan Desa Anti Politik Uang Tahun 2021 Desa Jenang Kecamatan Majenang	Memberikan pemahaman terkait bahayanya money politik beserta regulasinya supaya tercipta Pemilu yang Luber Jurdil kepada penduduk majenang
10	Diskusi Demokrasi dan Pengawasan Partisipatif bersama Mahasiswa UNUGHA Cilacap	18 Juni 2021	Mahasiswa UNUGHA Cilacap	Memberikan pemahaman terkait fungsi pengawasan pemilu dan pentingnya pengawasan partisipatif untuk menciptakan kualitas Demokrasi
11	Webinar Pojok Pengawasan "Meneguhkan Komitmen Netralitas ASN pada Pemilu dan Pilkada"	30 Agustus 2021	Warganet dan ASN di Kabupaten Cilacap	Memberikan pemahaman regulasi dan sanksi yang berlaku bagi ASN yang tidak netral
12	Rapat Koordinasi Pengembangan Desa Anti Politik Uang Tahun 2021 di Desa Rejamulya Kecamatan Kedungreja	1 September 2021	Rapat Koordinasi Pengembangan Desa Anti Politik Uang Tahun 2021 di Desa Rejamulya Kecamatan Kedungreja	Memberikan pemahaman terkait bahayanya money politik beserta regulasinya supaya tercipta Pemilu yang Luber Jurdil kepada penduduk Kedungreja

13	Pembinaan Kampung Pengawasan Tahun 2021 di Desa Ujungalang Kecamatan Kampunglaut	11 september 2021	Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Aktivistik Perempuan dan Pemuda Desa Ujungalang	Memberikan pemahaman terkait bahayanya money politik beserta regulasinya supaya tercipta Pemilu yang Luber Jurdil kepada penduduk kampunglaut
14	Rapat Koordinasi Pengembangan Desa Pengawasan Tahun 2021 di Desa Kesugihan Kidul Kecamatan Kesugihan	28 September 2021	Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Aktivistik Perempuan dan Pemuda Desa Kesugihan Kidul	Kepala Desa, perangkat desa, aktivis perempuan dan tokoh masyarakat memahami fungsi pengawasan pemilu dan pentingnya pengawas partisipatif untuk menciptakan kualitas Demokrasi
15	Rapat Koordinasi Pengembangan Desa Pengawasan Tahun 2021 di Desa Alangamba Kecamatan Binangun	14 Oktober 2021	Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Aktivistik Perempuan dan Pemuda Desa Alangamba	Kepala Desa, perangkat desa, aktivis perempuan dan tokoh masyarakat memahami fungsi pengawasan pemilu dan pentingnya pengawas partisipatif untuk menciptakan kualitas Demokrasi
16	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bagi Tim Penggerak PKK Desa Kalikudi	16 Oktober 2021	PKK Desa Kalikudi	Anggota PKK desa dapat memahami fungsi pengawasan pemilu dan pentingnya pengawas partisipatif untuk menciptakan kualitas Demokrasi
17	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bagi Pemilih Pemula di MAN 3 CILACAP	21 Oktober 2021	Siswa MAN 3 Cilacap	Memberikan pemahaman kepada pemilih pemula yang ada di MAN 3 Cilacap terkait fungsi pengawasan pemilu dan pentingnya pengawas partisipatif untuk menciptakan kualitas Demokrasi
18	Rapat Koordinasi Pengembangan Desa Anti Politik Uang Tahun 2021 di Desa Tritih Lor Kecamatan Jeruklegi	27 Oktober 2021	Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Aktivistik Perempuan dan Pemuda Desa Tritih Lor	Memberikan pemahaman terkait bahayanya money politik beserta regulasinya supaya tercipta Pemilu yang Luber Jurdil kepada penduduk jeruklegi
19	Rapat Koordinasi Pengembangan Desa Anti Politik Uang Tahun 2021 di Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah	28 Oktober 2021	Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Aktivistik Perempuan, KNPI dan Karang Taruna Kelurahan Sidanegara	Memberikan pemahaman terkait bahayanya money politik beserta regulasinya supaya tercipta Pemilu yang Luber Jurdil kepada penduduk Cilacap Tengah

20	Sosialisasi Pengawas Partisipatif bersama EX Panwaslu Kecamatan	3 November 2021	Ex Panwascam Cilacap Selatan, Cilacap Utara, Maos, Bantarsari, Patimuan, Kawunganten, Jeruklegi dan Sampang	Melakukan diskusi terkait kendala-kendala yang ada di tingkat kecamatan supaya Bawaslu Kabupaten Cilacap bisa memetakan kerawanan-kerawanan pada saat tahapan pemilu
21	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bagi Pemilih Pemula di Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an Cilacap	3 November 2021	Santri dan Santriwati Calon Pemilih Pemula pada Pemilu 2024	Memberikan pemahaman kepada pemilih pemula yang ada di Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an Cilacap Cilacap terkait fungsi pengawasan pemilu dan pentingnya pengawas partisipatif untuk menciptakan kualitas Demokrasi
22	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bagi Pemilih Pemula bersama Siswa SMKN 1 Cilacap	25 November 2021	Siswa SMKN 1 Cilacap Calon Pemilih Pemula pada Pemilu 2024	Memberikan pemahaman kepada pemilih pemula yang ada di SMKN 1 Cilacap Cilacap terkait fungsi pengawasan pemilu dan pentingnya pengawas partisipatif untuk menciptakan kualitas Demokrasi
23	Diskusi Demokrasi dan Pengawasan Partisipatif Pemilih Pemula bersama Siswa SMKN 2 Cilacap	26 November 2021	Siswa SMKN 2 Cilacap Calon Pemilih Pemula pada Pemilu 2024	Memberikan pemahaman kepada pemilih pemula yang ada di SMKN 2 Cilacap Cilacap terkait fungsi pengawasan pemilu dan pentingnya pengawas partisipatif untuk menciptakan kualitas Demokrasi
24	Goes To School Diskusi Demokrasi dan Pengawasan Partisipatif Pemilih Pemula bersama Siswa SMKN 2 Cilacap	29 November 2021	Siswa SMKN 2 Cilacap Calon Pemilih Pemula pada Pemilu 2024	Memberikan pemahaman kepada pemilih pemula yang ada di SMKN 2 Cilacap secara langsung dengan mendatangi sekolah
25	Menghadiri undangan menjadi Narasumber di STAIS Majenang	17 Desember 2021	Mahasiswa Stais Majenang	Memberikan pemahaman terkait kepemiluan kepada mahasiswa STAIS Majenang dan mengajak para mahasiswa untuk menjadi pengawas partisipatif
26	MoU Bersama Politeknik Negeri Cilacap	20 Desember 2021	Rektor PNC	Melakukan kerjasama dengan Politeknik Negeri Cilacap dengan harapan para mahasiswa dapat menjadi pengawas partisipatif

27	Diskusi Demokrasi dan Pengawas Partisipatif bersama PMII Cilacap	20 Desember 2021	PMII Cilacap	Memberikan pemahaman terkait fungsi Pengawasan pemilu dan pentingnya pengawas partisipatif untuk menciptakan kualitas Demokrasi yang baik dengan cara menularkan ilmu yang telah di dapat dari diskusi ini
28	Diskusi Demokrasi dan Pengawas Partisipatif bersama Mahasiswa PNC	22 Desember 2021	Mahasiswa PNC Cilacap	Memberikan pemahaman kepada mahasiswa PNC terkait fungsi pengawasan pemilu dan pentingnya pengawas partisipatif untuk menciptakan kualitas Demokrasi yang baik dengan cara menularkan ilmu yang telah di dapat dari diskusi ini
29	Ngobrol Bersama partai politik menjelang pelaksanaan tahapan pemilu serentak tahun 2024	24 Desember 2021	Partai Politik	Melakukan diskusi terkait pemilu serentak 2024 agar dapat memetakan potensi kecurangan-kecurangan dalam tahapan Pemilu

Berikut tabel sosialisasi produk hukum yang dilaksanakan Bawaslu secara Daring/ fasilitasi internet :

Tabel 5.2 Sosialisasi Produk Hukum Daring

No.	Jenis kegiatan	Waktu	Sasaran	Tujuan Kegiatan
1	Diskusi Menakar Keadilan Pemimpin dalam Paradigma Islam	12 Januari 2021	Masyarakat Umum	Memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kepemimpinan menurut Agama Islam
2	Dari Balik Meja Sekretaris Catatan Kinerja	16 Februari 2021	Masyarakat Umum	Masyarakat mampu mengetahui kinerja sekretariat Bawaslu Cilacap
3	Perspektif Penyelesaian Sengketa Pilkada	3 Maret 2021	Masyarakat Umum	Masyarakat dapat mengetahui alur penyelesaian dalam Pilkada
4	Perempuan Tangguh Untuk Demokrasi Berkualitas	8 Maret 2021	Masyarakat Umum	memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama kaum perempuan, bahwa perempuan juga dapat berpartisipasi dan ikut serta dalam menciptakan Demokrasi yang berkualitas
5	Permohonan dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu	31 Maret 2021	Masyarakat Umum	Masyarakat dapat mengetahui apa saja yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan sengketa pada pemilu
6	Perbedaan Sengketa Pemilu dan Sengketa Pilkada	20 April 2021	Masyarakat Umum	Masyarakat dapat mengetahui perbedaan penyelesaian sengketa pilkada dan pemilu
7	Kartini Abad 21	21 April 2021	Masyarakat Umum	mengedukasi kepada masyarakat terutama kaum perempuan untuk dapat ikut serta menjadi pengawas partisipatif
8	Sengketa dalam Konsep Keadilan Pemilu	28 Mei 2021	Masyarakat Umum	Masyarakat memahami pentingnya penyelesaian sengketa dalam keadilan pemilu
9	Menuju Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP)	18 Juni 2021	Masyarakat Umum	memberikan pemahaman tentang kepemiluan melalui sekolah kader pengawas partisipatif
10	Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	29 Juni 2021	Masyarakat Umum	Masyarakat dapat mengetahui proses mediasi dalam sengketa pemilu
11	Dukungan Sekretariat dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	29 Juli 2021	Masyarakat Umum	Masyarakat mampu mengetahui tugas-tugas dalam sekretariat dalam sengketa proses pemilu

12	Tahapan Ajudikasi dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	26 Agustus 2021	Masyarakat Umum	Masyarakat memahami tahapan adjudikasi dalam penyelesaian sengketa Proses Pemilu
13	Potensi Sengketa Pada Tahapan Pencalonan	28 September 2021	Masyarakat Umum	Masyarakat dapat mengetahui hal-hal apa saja yang dapat menjadi potensi pada tahapan pencalonan
14	Meneguhkan Komitmen Netralitas ASN Pada Pemilu dan Pilkada	30 September 2021	Masyarakat Umum	Memberikan pemahaman kepada ASN dan mengingatkan bahwa ASN harus netral
15	10 tahapan dalam Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	26 Oktober 2021	Masyarakat Umum	Masyarakat dapat mengetahui tahapan-tahapan ketika melakukan mediasi dalam sengketa proses pemilu
16	Meneladani Nilai-Nilai Kepahlawanan	10 November 2021	Masyarakat Umum	Masyarakat bisa memahami bahwa pahlawan itu bukan hanya mereka yang berperang untuk kemerdekaan tetapi mereka yang berjuang untuk menciptakan Demokrasi yang berkualitas pun bisa disebut pahlawan
17	Potensi Sengketa Pada Tahapan Pemilu dan Pilkada	26 November 2021	Masyarakat Umum	Masyarakat dapat mengetahui hal apa saja yang berpotensi sengketa pada pemilu dan pilkada
18	Identifikasi Permasalahan Pemilu dan Pilkada dalam Ranah Sengketa	14 Desember 2021	Masyarakat Umum	Masyarakat dapat memahami apa saja permasalahan yang bisa menimbulkan sengketa pada pemilihan dan pemilu

BAB VI
RENCANA KERJA DIVISI
HUKUM HUMAS DAN DATA INFORMASI
BAWASLU KABUPATEN CILACAP

Perencanaan adalah fungsi manajemen lembaga yang pertama dan terpenting. Perencanaan juga merupakan tahapan penting dari suatu fungsi manajemen kerja yang terutama dalam menghadapi perubahan lingkungan kerja yang dinamis. Dalam merencanakan kerja Tahun 2022 Divisi Hukum Humas dan Data Informasi Bawaslu Cilacap mendasari Pada Rapat Kerja Lembaga berdasar pada Rencana Anggaran Belanja yang diturunkan dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Dalam melaksanakan perencanaan kerja Tahun 2022

Tabel 6.1 Rencana Kerja Hukum dan Humas 2022

DIVISI	Program	Target output dan outcome
Hukum	Capacity Building (Sinau bareng Regulasi)	Target dalam kegiatan ini adalah staf di jajaran Bawaslu Kabupaten Cilacap. tujuan dari kegiatan ini untuk membedah regulasi dan mempelajari bersama-sama baik pimpinan maupun staf supaya lebih memahami terkait regulasi yang ada
	Fasilitasi pengelolaan Layanan Hukum	Target dalam kegiatan ini partai politik dan masyarakat umum Tujuan kegiatan memfasilitasi publik dalam layanan informasi dan diskusi yang berkaitan dengan aturan-aturan dalam pemilu
	Manajemen Sosialisasi produk hukum secara Daring (OBSESI)	Target dalam kegiatan ini adalah pengguna media sosial tujuan dari kegiatan ini untuk menyebarkan informasi dengan cepat terkait Bawaslu dan regulasinya dengan harapan yang menyaksikan tayangan ini lebih mengerti dan paham regulasi pemilu bahkan yang menyaksikan tayangan ini bisa berinteraksi langsung melalui kolom komentar jika ada yang ingin ditanyakan/sampaikan
	Sosialisasi produk hukum generasi milenial melalui saka adhyasta pemilu dan pemilih pemula go to school	Target kegiatan ini adalah Pemilih Pemula yang pada saat pemungutan surat suara berusia minimal 17 tahun tujuan kegiatan ini memberikan sosialisasi dan pemahaman terkait kepemiluan kepada para Pemilih Pemula dengan harapan para pemilih pemula dapat memahami regulasi pemilu dan dapat menjadi pengawas partisipatif

	Sosialisasi produk hukum kepada publik melalui webinar	Target kegiatan ini adalah masyarakat umum tujuan kegiatan ini adalah mensosialisasikan persiapan tahapan pilkada kepada publik secara virtual
	Sosialisasi produk hukum untuk komunitas difabel	Target kegiatan ini adalah komunitas difabel tujuan kegiatan ini untuk memberikan pemahaman kepemiluan kepada komunitas difabel dengan harapan komunitas difabel dapat menjadi Pengawas Partisipatif
Hubungan Masyarakat	Pelatihan penulisan berita (Jurnalistik)	Target dalam kegiatan ini adalah staf di jajaran Bawaslu Kabupaten Cilacap. tujuan kegiatan ini supaya staf Bawaslu dapat membuat dan menyajikan informasi/berita dengan menarik
	Pelatihan Video shooting dan Editing	Target dalam kegiatan ini adalah staf di jajaran Bawaslu Kabupaten Cilacap tujuan kegiatan ini, supaya staf di jajaran Bawaslu Kabupaten Cilacap dapat mengambil dan mengolah video supaya lebih menarik ketika disajikan untuk masyarakat
	Penerbitan Buletin Cahaya Pemilu	Target dalam penerbitan buletin ini adalah stakeholders, tujuan penerbitan buletin ini untuk menyebarkan informasi kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap selama satu semester dengan harapan ada masukan dari pihak luar terkait kinerja Bawaslu Cilacap supaya lebih baik lagi kedepannya
	Rapat dengan Media dan Stakeholders	Target dari kegiatan ini adalah wartawan dan stakeholders Tujuan dari kegiatan ini adalah menjalin kerjasama dalam pemilu baik dalam pengawasan maupun Publikasi
	Pembuatan Film Pendek	Target dari kegiatan ini masyarakat umum Tujuan dari kegiatan ini memberikan edukasi terkait kepemiluan melalui film pendek yang disajikan Bawaslu Kabupaten Cilacap
	Pembuatan Iklan Layanan Masyarakat	Target dari kegiatan ini masyarakat umum Tujuan dari kegiatan ini memberikan edukasi terkait kepemiluan melalui iklan layanan masyarakat yang disajikan Bawaslu Kabupaten Cilacap
	Peliputan Pembuatan Film Dokumenter pengawasan	Target dari kegiatan ini masyarakat umum Tujuan dari kegiatan ini menyampaikan

pada tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu (PN)	kegiatan-kegiatan yang telah terlaksana kepada masyarakat melalui film
Penerbitan Buku Sejarah Bawaslu Cilacap	
Sosialisasi kegiatan lewat media sosial	Target dari Kegiatan ini adalah Para Pengguna Media Sosial Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan edukasi dan pemahaman terkait tahapan-tahapan dalam pemilu melalui media sosial harapannya masyarakat mengetahui dan ikut berperan aktif menjadi pengawas partisipatif
Meningkatkan kehumasan dengan melakukan MoU dengan Stakeholders(Perguruan Tinggi dan ORMAS)	Target kegiatan ini adalah Stakeholders dan Organisasi Masyarakat Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengajak kerjasama kepada ormas dan stakeholder dengan harapan pada saat tahapan pemilu maupun pemilihan mereka dapat ikut serta melakukan pengawasan di lingkungan sekitar

BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akhir Divisi Hukum dan Humas Bawaslu Kabupaten Cilacap Tahun 2021 telah menunjukkan bagaimana kontribusi Divisi Hukum, dan Humas dalam menjalankan fungsi kelembagaan. Secara spesifik dalam laporan ini menyajikan capaian kinerja Divisi Hukum dan Humas tahun 2021 dan laporan ini menjadi tolak ukur terhadap capaian kinerja Lembaga Bawaslu Kabupaten Cilacap. Untuk menghasilkan upaya yang sinergis dalam rangka evaluasi program Divisi Hukum dan Humas Bawaslu Cilacap tahun 2021 dan sebagai titik balik untuk merencanakan program dan kegiatan di tahun berikutnya.

Hasil yang telah dicapai oleh Hukum dan Humas dapat dimaksimalkan kembali melalui Rencana Kerja pada tahun berikutnya, dengan mengutamakan kesiapan internal. Pencegahan potensi pelanggaran melalui sosialisasi kepada masyarakat menjadi langkah strategis bagi Bawaslu. Hal ini dilakukan sebagai upaya peningkatan kesadaran hukum dan kedaulatan dalam berdemokrasi oleh masyarakat.

Kerja Divisi Hukum sangat penting dalam memberikan fasilitasi dan konsultasi kajian hukum kepada Divisi lain. Hal ini sebagai sumber referensi penetapan kebijakan terhadap relevansi kondisi sosial politik masyarakat dan juga untuk melahirkan gagasan yang normatif sekaligus progresif dalam penyelesaian masalah.

B. SARAN

Program Kerja Bawaslu Kabupaten Cilacap sudah terlaksana dengan baik. Akan tetapi ada beberapa sektor atau bagian yang perlu diperbaiki demi meningkatkan efisiensi kinerja dan responsibilitas masyarakat. Dikarenakan program kerja Bawaslu Kabupaten Cilacap tidak akan terlaksana dengan maksimal tanpa adanya partisipasi dari masyarakat.

Pertama, Peningkatan Sosialisasi Produk Hukum yang dihasilkan oleh Bawaslu, dikarenakan produk hukum merupakan salah satu tanggung jawab lembaga terhadap mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara.

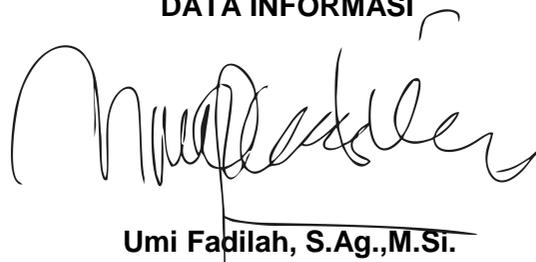
Kedua, Urgensi Peningkatan Kapasitas Divisi Hukum sebagai salah satu garda terdepan dalam Lembaga Bawaslu, dikarenakan menjadi sumber analisa / kajian hukum dan sarana komunikasi Lembaga dengan masyarakat.

Ketiga, Perlunya Kajian Hukum secara berkala untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan terkait Perbawaslu, PKPU, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang ada kaitannya dengan Pemilihan Umum.

Keempat, Kinerja yang efisien harus ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendapatkan hasil kinerja yang optimal.

Cilacap, 20 Januari 2022

**KOORDINATOR DIVISI HUKUM,
HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
DATA INFORMASI**



Umi Fadilah, S.Ag.,M.Si.

LAMPIRAN-LAMPIRAN